

# Aspek Budaya dalam Adopsi Inovasi: Antisipasi Kasus Pengembangan Padi di Merauke

Adi Widjono<sup>1</sup>

## Ringkasan

Keputusan petani untuk mengadopsi atau menolak suatu inovasi (teknis atau kelembagaan) selalu didasarkan pada pertimbangan yang lebih luas daripada sekedar aspek teknis dan finansial bidang pertanian. Mereka juga mempertimbangkan budaya, nilai-nilai pribadi dan sosial, yang tidak selalu mudah dinalar dan karenanya kerap diabaikan para agen pembangunan. Pengabaian budaya petani dalam pembangunan pertanian bukan hanya dapat menggagalkan adopsi suatu inovasi, tetapi juga dapat mengakibatkan konflik yang kontra produktif dan tidak perlu. Program pengembangan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional perlu diselenggarakan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek budaya masyarakat adat setempat yang merasa makin terdesak di lahan leluhur mereka sendiri. Dengan demikian program tersebut akan memberikan dampak nasional secara nyata, sekaligus meningkatkan kesejahteraan yang adil bagi masyarakat adat setempat.

**P**ara agen pembangunan pertanian (peneliti, penyuluh, pembuat-kebijakan, dsb.) kadang-kadang kurang berhasil meyakinkan petani untuk mengadopsi inovasi, baik teknis maupun kelembagaan. Kebanyakan kasus semacam itu disebabkan bukan oleh faktor teknis inovasi yang keunggulannya telah teruji, tetapi oleh faktor sosial. Kekakuan para agen pembangunan untuk hanya memperhatikan aspek teknis dan mengabaikan aspek sosial menghambat adopsi inovasi oleh petani.

Sebagai individu atau anggota masyarakat sosial, setiap petani adalah subyek yang selalu memroses informasi dari sekitarnya, dan dengan itu membuat keputusan-keputusan yang dia anggap terbaik bagi dirinya. Persepsi<sup>2</sup> bahwa petani, karena tingkat sosialnya yang rendah atau karena alasan lainnya, kurang mampu membuat keputusan terbaik bagi dirinya sendiri, adalah anggapan yang keliru. Persepsi semacam itu mereduksi kemanusiaan petani sebagai obyek, bertentangan dengan prinsip pembangunan pertanian yang ditujukan antara lain untuk lebih memanusiakan petani.

---

<sup>1</sup> Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor  
adiwidjono@yahoo.com

<sup>2</sup> Persepsi adalah makna yang diberikan seseorang/sekelompok orang pada sesuatu. Karena bersifat subjektif, persepsi tidak harus mencerminkan realitas.

## Beberapa Contoh Kasus

Banyak kasus menunjukkan bahwa keputusan petani untuk mengadopsi atau menolak suatu inovasi lebih didasarkan pada pertimbangannya sendiri, bukan pertimbangan orang lain. Karena sangat spesifik dan subyektif, pertimbangan para petani itu tidak mudah difahami oleh para agen pembangunan.

Pertimbangan petani lebih luas daripada sekedar aspek teknis dan produksi yakni apakah secara keseluruhan adopsi suatu inovasi akan menguntungkan bagi dirinya. "Menguntungkan" di sini tidak hanya secara finansial, tetapi juga apakah, misalnya, inovasi itu layak/mudah diterapkan dan membuatnya tetap diterima oleh masyarakat sekitarnya.

Pada suatu ketika peneliti berhasil mendemonstrasikan teknik budidaya padi yang secara ekonomis lebih menguntungkan dibanding teknik yang sedang umum diterapkan petani di Riau.<sup>3</sup> Para petani pun mengakui itu, tetapi selalu berkilah untuk tidak mengadopsinya. Mereka lebih memilih pekerjaan luar usahatani (*off-farm*), seperti kuli angkut dan penarik becak, yang bagi mereka lebih menguntungkan daripada memperbaiki teknologi pertaniannya. Kasus ini merupakan contoh bagaimana, dalam persepsi petani, keuntungan finansial dari inovasi yang ditawarkan kalah dibanding inovasi yang tidak dipertimbangkan agen pembangunan.

Penyuluh di suatu kecamatan di Jawa Timur merasa tidak berhasil mendorong petani menggunakan benih berlabel. Tetapi kemudian terungkap bahwa, bagi sebagian petani, label tidak menjamin mutu benih. Mereka lebih suka membeli benih dari produsen atau penangkar yang mereka kenal secara pribadi dan percayai, sekalipun tidak berlabel. Walaupun hal ini merupakan kasus spesifik, ini menggambarkan bagaimana suatu inovasi bagus pada arturan formal, tetapi bisa kurang bagus di lapangan.<sup>4</sup>

Seorang petani koperator di Batumarta secara misterius *kehilangan* kambing yang beberapa kali diintroduksikan oleh peneliti untuk meningkatkan pendapatan mereka. Belakangan diketahui bahwa mereka berasal dari suatu komunitas di Bali yang tidak menyukai kambing (tetapi sangat menyukai babi). *Kehilangan* itu hanya suatu cara halus untuk menolak kambing.

Di pedalaman Merauke, seorang peneliti putus asa menghadapi para petani koperator di suatu desa yang tidak kunjung menerapkan teknologi introduksi. Padahal, selain panjar upah, banyak bahan dan alat telah diberikan kepada mereka. Peneliti itu tidak faham bahwa di tengah kelompok masyarakat adat yang egaliter tersebut para koperator merasa tidak layak untuk secara

---

<sup>3</sup> Kasus-kasus dalam bab ini diambil dari pengalaman penulis dalam berbagai kegiatan survei.

<sup>4</sup> Bandingkan juga dengan pengendalian hama terpadu, pengapuran tanah masam, varietas unggul yang benihnya sulit diakses, dsb.

eksklusif menikmati kemudahan (*privilege*) dan bekerjasama dengan orang dari luar kelompoknya.

Dua kasus terakhir memperlihatkan bahwa faktor non-finansial bisa mempengaruhi keputusan petani dalam adopsi suatu inovasi. Nilai-nilai budaya kerap dianggap petani jauh lebih penting daripada nilai finansial.

Pada beberapa kasus lain, perolehan keuntungan finansial yang lebih tinggi bahkan dianggap bukan sesuatu yang perlu ketika seluruh kebutuhan hidup tradisional sudah dirasakan terpenuhi. Di tengah masyarakat subsisten tradisional seperti ini, bujukan bagi mereka untuk lebih produktif dianggap gangguan pada ketenangan dan keselarasan pola hidup yang mereka warisi dari para leluhur. Dorongan untuk mengubah cara hidup itu dapat dipersepsikan oleh masyarakat ybs. sebagai penghinaan atas identitas budaya mereka.

## Budaya

Budaya dalam konteks ini adalah nilai-nilai yang dianut secara kolektif serta menentukan pola pikir dan pola tindak para anggota suatu kelompok masyarakat. Nilai-nilai itu dapat tidak berhubungan dengan keyakinan pribadi penganutnya dan tidak selalu perlu dinalar. Budaya mempunyai kekuatan memaksa para anggota suatu kelompok masyarakat untuk menerapkan perilaku tertentu (Sairin 2002). Bagi sebagian, kepatuhan pada identitas nilai-nilai, jauh lebih penting daripada sekedar keuntungan ekonomis sehingga perbedaan budaya (multikulturalisme) adalah fakta kehidupan yang tidak mudah diubah dengan alasan ekonomi (Shweder 2006).

Bila seseorang telah menginternalisasi atau meyakini suatu nilai, maka ketidak-patuhannya pada nilai itu akan mengakibatkan disonansi, ketidaknyamanan psikologis, yang sangat menyiksa. Dalam kasus ekstrim, orang lebih memilih mati daripada mengalami disonansi semacam ini.<sup>5</sup> Misalnya, sebagian petani Jawa menanam padi bukan karena komoditas itu menguntungkan secara finansial, tetapi karena dia merasa bahwa hal itu merupakan kewajiban baginya sebagai petani.

Bila seseorang tidak secara pribadi meyakini suatu nilai, maka kepatuhannya (konformitas) pada nilai itu dilakukan untuk menghindari pengucilan. Bagi seseorang yang merasa sangat bergantung pada kelompoknya, pengucilan pun dapat merupakan siksaan psikologis yang tidak tertanggungkan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ini menerangkan kasus bunuh diri akibat kenyataan hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai seseorang.

<sup>6</sup> Ini menerangkan bagaimana seseorang "berkhianat" pada orang luar-kelompoknya demi tetap diterima oleh kelompoknya sendiri.

Kebanyakan agen pembangunan, termasuk para ahli ekonomi, kurang mempertimbangkan budaya karena aspek itu menghadirkan masalah-masalah mendasar, sulit diukur, dan beroperasi dalam konteks yang amat kompleks dengan psikologi, kelembagaan, politik, geografi, dan banyak aspek lain (Harrison 2006).

Dalam satu kasus di suatu desa, para petani secara terpisah mengeluhkan tingginya tingkat kehilangan hasil padi mereka yang dipanen dengan cara *gotong royong*. Dengan pola panen yang sudah berlaku puluhan tahun di desa tersebut, setiap petani yang memanen sawahnya harus dibantu para petani lain tetangganya. Karena memanen bukan sawahnya sendiri dan dikejar berbagai pekerjaan lain dengan perubahan kondisi sosial akhir-akhir ini, para *pemanen* tidak cukup peduli dengan banyaknya malai dan bulir yang tidak terpanen. Sekali pun sekarang semua petani secara pribadi merasa dirugikan pola panen itu, tidak seorang pun berani tampil mengusulkan cara yang lebih baik. Masing-masing mengira bahwa hanya dia sendiri yang mempunyai gagasan “berbeda”.<sup>7</sup> Di sini setiap anggota suatu komunitas terpaksa menyesuaikan diri (konform) pada budaya yang, tanpa mereka sadari, sama-sama tidak mereka sukai.

Seorang penyuluh mendapat kesulitan menalar alasan para petani di lembah Baliem (Jayawijaya) menolak menanam ubi jalar dengan jarak tanam lebih rapat untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak per satuan luas per satuan waktu. Dia tidak mengerti bahwa bagi petani tradisional suku Dani, besarnya ukuran tiap umbi lebih penting daripada produktivitas total umbi per satuan luas per satuan waktu.

Ketika petani menolak adopsi suatu inovasi, para agen pembangunan cenderung menganggap mereka terlalu bodoh untuk memahami atau terlalu malas untuk menerapkan inovasi. Prasangka dan tuduhan semacam itu bukan hanya menimbulkan resistensi dalam adopsi inovasi, tetapi juga mengakumulasi ketidakpercayaan petani pada agen pembangunan yang pada gilirannya makin menguatkan resistensi. Kesaling-percayaan diperlukan setiap masyarakat untuk membangun dirinya secara lebih lancar dan efisien (Fukuyama 2006).

Bila tidak dijumpai, perbedaan budaya antara para agen pembangunan dan masyarakat petani dapat menimbulkan konflik yang kontra-produktif, bahkan berdarah. Sayangnya aspek sosial, khususnya budaya, jarang mendapat perhatian yang cukup dalam berbagai program pembangunan.

Budaya petani hanya dapat difahami bila kekhasan budaya itu diterima sebagai apa adanya, bukan sebagai yang dikehendaki para agen pembangunan (Liliweri 2002).

---

<sup>7</sup> Gejala ini disebut *spiral kebisuan* (spiral of silence).

## Memahami Budaya Petani

Dengan lingkungan dan pengalaman yang khas, setiap kelompok masyarakat mempunyai budaya yang spesifik.<sup>8</sup> Budaya merupakan hasil proses adaptasi yang panjang suatu sistem sosial pada lingkungannya (Edgerton 2006). Perbedaan lingkungan dan pengalaman menyebabkan perbedaan budaya, nilai-nilai, bingkai acuan. Perbedaan ini disebut *heterofili*. Sebaliknya kesamaan lingkungan dan pengalaman menyebabkan kesamaan budaya, nilai-nilai, bingkai acuan. Kesamaan ini disebut *homofili*. Semakin berbeda lingkungan dan pengalaman dua kelompok, semakin heterofili mereka.

Di tingkat nasional, peneliti dan pembuat-kebijakan, karena mempunyai lingkungan dan pengalaman yang kurang lebih sama, mempunyai budaya yang serupa, cukup homofili. Mereka biasanya tidak sulit untuk sepakat dalam mempersepsikan sesuatu, misalnya bahwa pertanaman dengan produktivitas tinggi lebih baik daripada pertanaman dengan produktivitas rendah.

Hal yang sama terjadi pada para petani dalam suatu kelompok. Karena mempunyai lingkungan dan pengalaman yang sama, mereka mempunyai budaya yang sama dan karena itu mudah saling memahami.

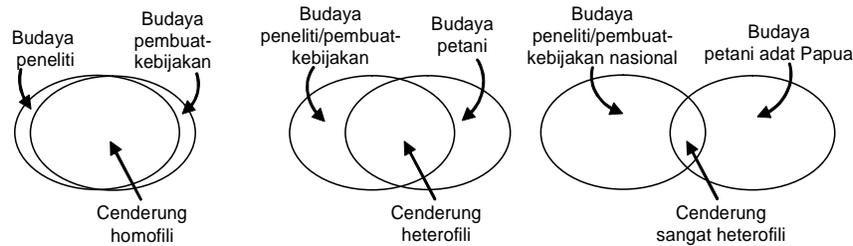
Tetapi peneliti atau pembuat-kebijakan dan petani mempunyai lingkungan dan pengalaman yang berbeda sehingga mereka heterofili. Apa yang baik bagi peneliti dan pembuat-kebijakan tidak selalu baik bagi petani, dan sebaliknya. Ini menerangkan mengapa suatu inovasi yang baik bagi peneliti atau pembuat-kebijakan kadang-kadang sulit diadopsi petani.

Kelompok petani yang berbeda bisa mempunyai budaya berbeda. Inovasi yang diterima satu kelompok petani tidak pasti dapat diterima kelompok petani lain. Misalnya, budaya petani Jawa berbeda dengan budaya petani adat Papua. Bila peneliti dan petani Jawa sudah mempunyai budaya berbeda, perbedaan budaya itu lebih besar lagi antara peneliti di Jawa dengan petani adat Papua. Artinya, selama para peneliti lebih berafiliasi pada kondisi Jawa, ancaman konflik akibat pembangunan pertanian di Papua lebih besar daripada di Jawa (Gambar 1).

Tingkat heterofili antara peneliti/pembuat-kebijakan dan petani dapat diturunkan hingga tingkat homofili yang sama-sama dapat diterima, bila ada saling pemahaman dan penghargaan atas nilai-nilai budaya masing-masing. Kedua pihak perlu saling berempati, menempatkan diri dalam lingkungan dan pengalaman pihak lain. Penilaian dan kritik negatif sepihak atas suatu budaya adalah ketidak-bijakan yang menusuk ego serta melukai identitas dan harga diri (Landes 2006).

---

<sup>8</sup> Harrison (2006) mengacu J. Diamond. 1997. *Guns, Germs, and Steel*. Norton, New York.



Gambar 1. Semakin berbeda budaya dua kelompok, semakin besar perbedaan persepsi mereka, semakin besar potensi konflik antara mereka.

Namun, dengan asumsi bahwa peneliti/pembuat-kebijakan, pada statusnya (pengalaman, pendidikan, ekonomi, dan mobilitas) mempunyai peluang berempati lebih baik, inisiatif dan upaya pemahaman budaya sewajarnya lebih banyak dilakukan oleh para peneliti dan pembuat-kebijakan.

## Pengembangan Padi di Merauke

Kemandirian beras Indonesia semakin terancam oleh berbagai hal seperti menyusutnya luas sawah, menurunnya minat petani untuk menanam padi, bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya permintaan beras bagi kebutuhan non-pangan, serta anomali iklim. Sehubungan dengan itu, kelimpahan lahan berpotensi dan belum tersentuh pertanian di beberapa wilayah adalah salah satu aset bagi peningkatan produksi padi nasional. Hasil beberapa studi pendahuluan menjanjikan peningkatan produksi padi nasional secara nyata bila sebagian Kabupaten Merauke dibuka sebagai persawahan (Makarim *et al.* 2006).

Namun, pengembangan Merauke sebagai lumbung padi (Distan Merauke 2007) perlu dikaitkan dengan perbaikan kesejahteraan lahir dan batin manusia, termasuk masyarakat adat di mana pembangunan itu diselenggarakan. Sekali pun merupakan proses perubahan menuju kesejahteraan yang lebih baik, pembangunan selalu meminta pengorbanan. Tingkat perbaikan kesejahteraan yang akan diraih seharusnya lebih besar atau sebanding dengan tingkat pengorbanan yang diberikan. Artinya, tingkat perbaikan kesejahteraan yang dapat dinikmati masyarakat selayaknya sebanding dengan pengorbanannya.

Dalam program pengembangan Merauke sebagai satu lumbung padi nasional, masyarakat yang akan memberi korbanan bagi, dan memetik keuntungan dari, proses itu, dapat dibagi secara umum menjadi (1) masyarakat adat (*indigenous people*) dan (2) masyarakat bukan-adat (pendatang).

## Perbaikan Kesejahteraan

Target utama program ini tentu saja perbaikan ketersediaan pangan nasional dalam jumlah, mutu, dan harga. Ini akan dinikmati terutama oleh masyarakat bukan-adat yang mengonsumsi beras. Masyarakat adat Merauke, secara keseluruhan, jarang menghadapi kesulitan pangan. Mereka tidak sangat bergantung pada padi yang bukan pangan pokok tradisional. Dan kalau pun seluruh penduduk Merauke menjadi konsumen nasi, tingkat produksi padi kabupaten itu sudah melebihi di atas permintaan domestiknya (Bappeda & BPS Merauke 2005).

Dengan demikian, dari sudut pandang produksi padi, keberhasilan program ini akan lebih menyejahterakan masyarakat bukan-adat daripada masyarakat adat Merauke.

## Pengorbanan

Untuk program pengembangan padi Merauke ini, masyarakat adat akan kehilangan sebagian lahannya termasuk berbagai sumber kehidupan yang ada di dalamnya, situs-situs sakral, padang perburuan, kelimpahan komoditas asli, obat-obatan, sumber air. Anggapan bahwa lahan yang tidak dihuni manusia adalah lahan tak bertuan, dalam budaya Papua/Merauke, sangatlah keliru. Ini berbeda dengan sistem undang-undang nasional yang cenderung mengabaikan keberagaman sosial masyarakat adat, terutama yang berkaitan dengan sumber-sumber agraria (Atok 2003).

Secara umum, masyarakat adat akan harus mengorbankan sebagian besar pola hidup yang dianggap sebagai sokoguru kebahagiaan hidup mereka. Pengorbanan ini pada gilirannya akan menyebabkan disorientasi budaya yang secara psikologis sangat menyakitkan.

Implementasi program pengembangan padi Merauke akan menuntut pengorbanan materi, budaya, dan psikologis yang jauh lebih besar dari pihak masyarakat adat dibanding dari masyarakat bukan-adat.

Pengorbanan masyarakat adat itu masih dapat terus bertambah sebagai dampak keterkejutan akibat masuknya budaya baru yang menantang kebanggaan mereka akan identitas adat. Di dalamnya ada keterdesakan oleh, dan kecemburuan pada, masyarakat bukan-adat yang akan semakin deras masuk mencari penghidupan. Masyarakat adat setempat saat ini semakin merasa terdesak dan selalu diposisikan sebagai pecundang dalam pemanfaatan sumber daya alam di lahan leluhur mereka sendiri (Arif & Aulia 2007, Widjono 1999, Levang 2003).

## Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan ribuan hektar sawah di Merauke akan membutuhkan sejumlah besar tambahan SDM pendukung yang sesuai. Mereka bukan hanya petani yang akan menjalankan operasi produksi padi, tetapi juga pedagang, mekanik, operator alat dan mesin, para manajer lembaga-lembaga baru, maupun guru sekolah.

Cara termudah untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan mendatangkan masyarakat bukan-adat dari luar Merauke (transmigrasi). Tetapi itu berarti bahwa lapangan pekerjaan yang dimunculkan program ini akan semakin lebih menguntungkan masyarakat bukan-adat daripada masyarakat adat yang telah berkorban jauh lebih banyak bagi keberhasilan program. Pada gilirannya, kecemburuan tersebut berpotensi menimbulkan senjang dan konflik sosial yang sulit diselesaikan dan/atau meninggalkan aib yang sulit dilupakan.

## Kebijakan bagi Keberhasilan

Uraian di atas tidak bermaksud mengatakan bahwa program pengembangan Merauke sebagai lumbung padi tidak layak. Melainkan, uraian tersebut mengimplikasikan bahwa kebijakan program itu perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati agar berhasil membawa kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh komponen bangsa secara adil.

Perbedaan budaya masyarakat adat perlu dipandang sebagai energi sosial yang bila dikelola dengan baik dapat mendorong pembangunan pertanian nasional. Pengakuan dan penghormatan atas keberagaman tersebut dalam pengembangan Merauke sebagai lumbung pangan nasional juga akan berdampak positif pada semua bidang pembangunan lain.

Masyarakat adat perlu dilibatkan sebagai subyek aktif sejak awal perencanaan hingga pelaksanaan serta evaluasi program. Partisipasi mereka sebagai subyek dalam pembangunan di wilayah mereka sendiri akan lebih memungkinkan program ini selaras dengan aspirasi masyarakat adat dan menjauhkan masalah-masalah sosial yang tidak perlu.

Untuk lebih mampu berperan sebagai subyek aktif, masyarakat adat memerlukan pendidikan yang memadai. Pendidikan dalam hal ini bukan hanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga perbaikan afeksi. Pendidikan perlu memberi kesadaran, perbaikan pola pikir dan pola tindak yang mendukung kemampuan masyarakat adat menyikapi perubahan zaman secara arif dan layak. Tanpa itu, anggota masyarakat adat akan tetap menjadi penonton atau sekedar menjadi pemeran pembantu, pelengkap, dan

terpinggirkan dalam pembangunan nasional yang seharusnya juga untuk mereka.

Di pihak lain, pendidikan pun diperlukan masyarakat bukan-adat yang akan banyak terlibat dalam program ini sehingga mereka dapat memahami dan menghargai nilai-nilai masyarakat adat. Dengan demikian, dikotomi latar belakang budaya adat dan bukan-adat dapat dilunakkan dan tidak memicu kesalah-fahaman yang mengganggu keberhasilan program.

Pendidikan dan penyadaran akan perlunya program ini bagi kemaslahatan bersama, khususnya bagi kebaikan masyarakat adat sendiri, selayaknya dilakukan melalui dialog, komunikasi dua arah yang terbuka, jujur, dan dilandaskan atas semangat saling menghargai. Dengan niat baik, dialog-dialog dapat difasilitasi oleh lembaga-lembaga adat dan agama, bahkan lembaga swadaya masyarakat yang berkompeten.

## **Kegiatan Awal Penanganan Aspek Budaya**

Untuk menangani aspek budaya masyarakat adat bagi keberhasilan pengembangan Merauke sebagai lumbung padi nasional, kegiatan awal yang tepat perlu dilakukan untuk sosialisasi program dan pemahaman aspirasi masyarakat adat. Kegiatan ini mengawali proses dialog untuk membangun kesaling-mengertian semua pihak bagi keberhasilan program.

Pada tahap sangat awal, suatu studi deskriptif dapat dikoordinasi oleh pihak yang mempunyai cukup komitmen untuk keberhasilan program nasional, sekaligus mempunyai cukup empati pada kepentingan kultural masyarakat adat Merauke. Studi tersebut dimulai dengan mendekati para tokoh adat dan tokoh agama yang memahami pentingnya program pengembangan ini sekaligus mempunyai dedikasi yang tinggi pada kesejahteraan masyarakat.

Di tahap-tahap selanjutnya, melalui tokoh-tokoh tadi, lebih banyak representasi masyarakat adat dilibatkan dalam dialog konstruktif. Dengan begitu kepentingan pembangunan nasional dan kepentingan masyarakat adat dapat dipertemukan secara adil dalam program pengembangan yang selaras dan berhasil.

## **Penutup**

Keberhasilan penanganan aspek budaya akan sangat memperbesar peluang keberhasilan program pengembangan Merauke sebagai salah satu lumbung padi nasional, maupun program-program pertanian pertanian lain di tingkat petani.

Sebaliknya, kegagalan penanganan aspek budaya dapat membuat program pembangunan pertanian dapat menjadi sangat kurang efektif dan efisien, bahkan memberikan lebih banyak kesulitan daripada kenyamanan bagi semua pihak.

## Pustaka

- Arif, A. & L. Aulia. 2007. Suku Marind-anim Menuju Batas Akhir ... Harian Kompas, Minggu, 16 September 2007.
- Atok, K. 2003. Bagaimana Memperluas Partisipasi masyarakat Lokal Dalam Sistem Demokratis untuk Mencapai Pemerintah Lokal yang Baik di Era Otonomi? (Pengantar Diskusi). Institute for Research and Empowerment (IRE)-Pemberdayaan Masyarakat Adat, Yogyakarta.
- Bappeda & BPS Merauke. 2005. Merauke Dalam Angka 2000-2004.
- Distan Merauke. 2007. Proposal Merauke Integrated Rice Estate Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Merauke, Mei 2007 (tidak dipublikasikan).
- Edgerton, R.B. 2006. Kepercayaan dan Praktik Tradisional: apakah sebagian lebih baik daripada yang lainnya? *In*: L.E. Harrison & S.P. Hutington, Kebangkitan Peran Budaya: bagaimana nilai-nilai membentuk kemajuan manusia. LP3ES, Jakarta. p.194-213.
- Fukuyama, F. 2006. Modal Sosial. *In*: L.E. Harrison & S.P. Hutington, Kebangkitan Peran Budaya: bagaimana nilai-nilai membentuk kemajuan manusia. LP3ES, Jakarta. p.153-173.
- Harrison, L.E. 2006. Mengapa Budaya Penting. *In*: L.E. Harrison & S.P. Hutington, Kebangkitan Peran Budaya: bagaimana nilai-nilai membentuk kemajuan manusia. LP3ES, Jakarta. p.1-24.
- Kabupaten Merauke. 2006. Usulan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Merauke. (*tidak dipublikasikan*)
- Landes, D. 2006. Hampir Semua Perbedaan Berasal dari Budaya. *In*: L.E. Harrison & S.P. Hutington, Kebangkitan Peran Budaya: bagaimana nilai-nilai membentuk kemajuan manusia. LP3ES, Jakarta. p.226-42.
- Levang, P. 2003. Ayo ke Tanah Sabrang: transmigrasi di Indonesia. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Liliweri, A. 2002. Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya. LKiS, Yogyakarta.

- Makarim, A.K., M.O. Adnyana, A. Widjono, I.G.M. Subiksa, A. Hasanuddin, dan D. Pasaribu. 2006. Laporan Akhir Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Usahatani Berbasis Tanaman Pangan di Kabupaten Merauke, Papua. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor.
- Sairin, S. 2002. Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: perspektif antropologi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Shweder, R.A. 2006. Peta Moral, Kesombongan “Dunia Pertama,” dan Penginjil Baru. *In*: L.E. Harrison & S.P. Hutington, Kebangkitan Peran Budaya: bagaimana nilai-nilai membentuk kemajuan manusia. LP3ES, Jakarta. p.238-265.
- Widjono, A. 1999. Analisis Alih Teknologi Pertanian dalam Skema SADP: di Merauke dan Manokwari. *In*: A. Musaddad, S. Saenong, H. Lakuy, Atekan (eds.), Hasil-hasil Penelitian SADP. Proyek Penelitian Sistem Usahatani Irian Jaya, Pusat Penelitian Sosial-Ekonomi Pertanian, Bogor. p.1-5.